

# PERANAN RUANG PUBLIK DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT MULTIKULTURAL

**Hendrikus T. Gedeona**

STIA LAN Bandung, Jalan Cimandiri No. 34-38 Bandung, Telp. 022-4220921  
E-mail: herigd@yahoo.com

*Indonesia has many religions, ethnics, tribes, local languages, and race, as national culture wealth for we must be greatfull. Nevertheless, those culture wealth also keep tacit potency conflict, riot, civil war, even murder among society. It is more complicated because irresponsible political elites exploite this condition for sake of politics. Multicultural that is actually our national pride, can become "time bomb" that sometimes can endanger our national unity. In this context, Habermas a Germany Philosopher has offered a brilliant idea about the importance of public sphere to develop good coexistence. How the idea could give contribution of solution in multicultural nation? This Article tries to elaborate it.*

*Key word: public sphere, social life, multicultural*

## A. PENDAHULUAN

Sejak bangkitnya demokrasi di Indonesia, pembicaraan mengenai hidup bersama tidak lagi didominasi oleh wacana buatan negara. Setiap orang berhak untuk berbicara dan mengajukan usul mengenai bagaimana hidup bersama harus diatur. Mengingat yang terlibat dalam pembicaraan tersebut mempunyai latar belakang dan pengalaman yang berbeda, maka tentu subjektivitas relatif terbuka.

Salah satu bentuk subjektivitas dan partikularitas tersebut adalah fakta bahwa berbagai macam suku bangsa, berikut praktik budayanya, hidup bersama di Indonesia. Keragaman yang sering disebut dengan kondisi multikultural itu merupakan faktor penting yang perlu diperhitungkan dalam pembicaraan mengenai hidup bersama.

Subjektivitas dan partikularitas bertemu di ruang publik. Pada ruang publik inilah, individu-individu serta berbagai kelompok masyarakat berusaha memperjuangkan hak-hak yang menyangkut eksistensi dan aspirasi hidupnya. Dalam rangka perjuangan itu terjadi tidak hanya tawar-menawar, kompromi, dan konsensus, tetapi juga konflik, dominasi, dan pemaksaan. Perbedaan dan partikularitas sekaligus kesamaan dan uniformitas saling-silang mengisi argumentasi-argumentasi yang beredar pada ruang publik. Oleh karena itu, kehidupan bersama masyarakat multikultural niscaya sangat ditentukan oleh apa yang terjadi dalam ruang publik ini.

Salah seorang penggagas konsep mengenai ruang publik adalah Jurgen Habermas. Gagasannya telah mendapat banyak apresiasi. Oleh karena itu pembicaraan mengenai ruang publik tidak bisa terlepas dari sumbangan pemikirannya. Tulisan ini mempunyai satu tujuan sederhana, yaitu mempertimbangkan seberapa jauh pemikiran Habermas mengenai ruang publik memadai dalam konteks multikulturalisme. Artikel ini akan diawali dengan penelusuran atas pemikiran Habermas mengenai ruang publik. Kemudian setelah memperlihatkan satu problematika mendasar dalam multikulturalisme, penulis akan menilai apakah ruang publik dalam bangunan pemikiran Habermas sanggup menawarkan solusi untuk problematika yang ada.

## B. RUANG PUBLIK

Bangun lengkap pemikiran Habermas mengenai ruang (atau dunia) publik dapat ditemukan dalam karyanya *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society* (1989, dalam Poerpowardjojo, 2007) yang terbit pertama kali dalam bahasa Jerman tahun 1962. Buku ini mengulas dua tema pokok, yaitu asal mula historis ruang publik borjuis, diikuti oleh analisis terhadap perubahan struktural ruang publik di zaman modern yang ditandai oleh bangkitnya kapitalisme, industri kebudayaan, dan makin kuatnya posisi organisasi-organisasi ekonomi serta kelompok bisnis besar dalam kehidupan publik.

Dalam buku tersebut, ruang publik yang muncul sekitar awal abad ke-18 digambarkan sebagai jembatan yang menghubungkan kepentingan pribadi dari individu-individu dalam kehidupan keluarga dengan tuntutan serta kepentingan kehidupan sosial dan publik yang muncul dalam konteks kekuasaan negara. Mediasi ruang publik juga mencakup kontradiksi yang sering digambarkan antara kepentingan borjuis di satu pihak dan kepentingan warga negara di lain pihak. Tujuan mediasi ruang publik adalah untuk mengatasi perbedaan-perbedaan dalam berbagai kepentingan dan pendapat pribadi tersebut, dan akhirnya menemukan kepentingan umum serta mencapai konsensus bersama. Ruang publik terdiri dari organ-organ penyedia informasi dan perdebatan politis seperti surat kabar dan jurnal; termasuk ruang publik adalah juga lembaga-lembaga diskusi politis seperti parlemen, klub-klub politik, klub-klub sastra, perkumpulan-perkumpulan publik, rumah minum dan warung kopi, balaikota, dan tempat-tempat publik lainnya yang menjadi ruang terjadinya diskusi sosial politik. Di tempat-tempat itu, kebebasan berbicara, berkumpul, dan berpartisipasi dalam debat politik dijunjung tinggi. Kepublikan (*publicity*) yang terjadi dalam ruang publik dengan sendirinya mengandung daya kritis terhadap proses-proses pengambilan putusan yang tidak bersifat publik.

Yang monumental dalam sejarah munculnya ruang publik adalah bahwa ruang publik menandai bangkitnya suatu masa dalam sejarah ketika individu-individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat dapat membentuk opini publik, memberikan tanggapan langsung terhadap apa pun yang menyangkut kepentingan mereka sambil berusaha mempengaruhi praktik-praktik politik. Ruang publik memupuk oposisi terhadap bentuk-bentuk hierarkis dan tradisional dari otoritas feodal yang selama berabad-abad menguasai praktik politik di Eropa. Diskusi-diskusi publik, menurut Habermas, muncul dari suatu tahap tertentu perkembangan masyarakat borjuis. Lahirnya ekonomi pasar telah memperluas ruang hidup banyak orang melebihi batas-batas wilayah domestik. Mereka adalah para pedagang dan pengusaha yang terus bertambah jumlahnya dan meluas pengaruhnya, sementara lembaga-lembaga politik mapan saat itu tidak memungkinkan partisipasi kalangan swasta seperti mereka. Di ruang publik, mereka mendiskusikan dan menantang pemahaman mengenai hakikat kekuasaan yang berlaku hingga saat itu.

Senjata utama kalangan non-bangsawan untuk bersuara di ruang publik adalah pengetahuan. Para pedagang dan pengusaha pada saat itu merupakan kalangan terpendang karena pendidikan dan kekayaannya, meskipun mereka bukan keturunan bangsawan. Mereka inilah yang disebut 'publik', dan dengan klaim pengetahuan mengenai kepentingan umum, mereka berusaha mengubah masyarakat menjadi suatu ruang otonomi privat yang bebas dari campur tangan politik dan merombak negara menjadi otoritas yang terbatas pada beberapa fungsi saja serta diawasi oleh 'publik'. Di sinilah terletak rasionalitas perjuangan menegakkan ruang publik, yaitu ruang otonomi privat di satu pihak dan ruang politik negara di lain pihak. Ruang publik berfungsi sebagai penerus kepentingan masyarakat borjuis kepada negara. Idealnya, ruang publik mengubah otoritas politis negara menjadi otoritas "rasional" dalam ruang publik.

Rasionalitas borjuis demikian ini diukur oleh sejauh mana kepentingan umum terwakili, dan ruang publik berfungsi untuk menjamin tercapainya rasionalitas tersebut.

Akan tetapi, seiring perkembangan kapitalisme, organ-organ publik yang semula menjadi tempat diskusi publik lama-kelamaan mulai berubah fungsi. Pers tidak lagi menyuarakan opini publik dan perjuangan politik, melainkan menjadi ruang iklan. Komersialisasi, tumbuhnya perusahaan-perusahaan besar, meningkatnya intervensi negara demi stabilitas ekonomi, dan meluasnya pengaruh sains serta akal budi instrumental dalam kehidupan sosial memperparah proses depolitisasi ini. Perubahan struktural yang dimaksud Habermas terletak pada titik ini. Ruang publik berubah dari ruang diskusi rasional, debat, dan konsensus menjadi wilayah konsumsi massa dan dijajah oleh korporasi-korporasi serta kaum elite dominan. Analisis Habermas ini melanjutkan tradisi Sekolah Frankfurt yang melihat transisi dari kapitalisme pasar dan demokrasi liberal pada abad ke-19 menuju tahap kapitalisme negara dan monopoli yang tampil dalam rupa fasisme Eropa dan liberalisme *welfare state* di Amerika Serikat masa 1930-an. Bagi Sekolah Frankfurt, masa-masa itu menandai babak baru dalam sejarah yang ditandai oleh pencampuran antara otoritas politik dan ekonomi, industri budaya yang manipulatif, dan masyarakat terpimpin yang makin tidak demokratis dan bebas (Kellner, 2004: 5). Dalam istilah Habermas, proses ini disebut "refeodalisasi" ruang publik.

Refeodalisasi ruang publik menghasilkan opini publik yang tidak lagi terbentuk lewat perdebatan dan konsensus, melainkan opini publik yang dibentuk oleh kelompok elite media, politik, dan ekonomi. Di tangan mereka, opini publik kehilangan karakter publiknya. Habermas mengeluh, opini publik yang semula merupakan ekspresi keprihatinan untuk mencari kepentingan umum, sejak akhir abad ke-19 telah menjadi ekspresi kepentingan pribadi para elite tersebut. Pentas politik yang semula berisi usaha mencapai konsensus rasional telah menjadi ajang perebutan kekuasaan di antara berbagai kelompok kepentingan.

Sekalipun telah terjadi perubahan mendasar, Habermas masih menyimpan harapan. Habermas menawarkan agenda untuk menghidupkan kembali ruang publik dengan cara memulai proses komunikasi publik yang kritis melalui organisasi-organisasi yang menjalankan fungsi komunikasi publik itu. Menghidupkan kembali ruang publik berarti membangkitkan kembali kepublikan atau sifat publik yang kritis dalam organisasi-organisasi yang beroperasi di ruang publik. Sayangnya, tawaran ini terdengar seperti nostalgia borjuis saja tanpa contoh konkret, usulan strategi, dan sketsa bentuk baru ruang publik pascaborjuis. Habermas memang sempat menyebut beberapa pengecualian yang berlawanan dengan kecenderungan refeodalisasi (Held, 1997: 262). Misalnya, meskipun ruang publik melemah, terjadi perluasan hak-hak asasi dalam sistem pengamanan sosial yang dijalankan negara (*social welfare state*); tuntutan supaya informasi terbuka untuk publik diperluas tidak hanya meliputi lembaga-lembaga negara, tetapi juga semua organisasi yang berurusan dengan negara. Setidak-tidaknya, di tengah suasana komersialisasi dan intervensi negara, beberapa aspek ruang publik masih dapat ditegakkan.

Dalam *The Structural Transformation*, Habermas melakukan idealisasi ruang publik borjuis sebagai tempat berlangsungnya diskusi dan konsensus rasional. Idealisasi ini mendapat kritik karena agak meragukan bahwa politik pada masa itu digerakkan oleh norma rasionalitas, dan opini publik dibentuk oleh debat dan konsensus yang rasional seperti digambarkan oleh Habermas (Kellner, 2004: 7). Politik modern selalu tunduk pada rangkaian permainan kepentingan dan perebutan kekuasaan, sekaligus juga diskusi dan debat. Mungkin ada saja satu dua masyarakat yang berhasil mencapai tahap seperti itu,

namun memuja-muja dan membuat generalisasi dari pengecualian itu tampaknya terlalu berlebihan.

Gagasan Habermas mengenai ruang publik juga harus ditempatkan dalam kerangka besar teori kritis yang merupakan penentu identitas Sekolah Frankfurt. Pada periode 1930-an, Sekolah Frankfurt menerapkan metode kritik imanen. Dengan metode ini mereka melancarkan kritik terhadap masyarakat totaliter dan fasis di Eropa dari sudut pandang ide-ide Pencerahan seperti demokrasi, hak asasi manusia, kebebasan individu dan sosial, serta rasionalitas. Kualitas-kualitas yang imanen pada masyarakat borjuis dipakai untuk mengkritik penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat sesudahnya. Habermas masih terpengaruh oleh metode ini, setidaknya ketika ia mengidealkan rasionalitas ruang publik borjuis abad ke-18 dan mengeluhkan perkembangan masyarakat kapitalis sejak akhir abad ke-19.

Akan tetapi, Habermas juga terbawa perkembangan gagasan Sekolah Frankfurt, terutama sejak terbitnya *Dialectics of Enlightenment* (1947). Adorno dan Horkheimer dalam buku itu terlihat pesimis dengan prospek Pencerahan sebagai dasar suatu teori kritis. Menurut kedua tokoh Sekolah Frankfurt tersebut, di bawah bayang-bayang hantu Perang Dunia II di Eropa dan kapitalisme tanpa kendali di Amerika, Pencerahan berakhir dalam situasi yang serba berkebalikan. Demokrasi menjadi fasisme, akal budi hanya menghasilkan irasionalitas, dan kebudayaan berkembang menjadi alat manipulasi. Dalam situasi tersebut, prosedur memakai idealisme borjuis sebagai norma kritik, telah dibungkam oleh *barbarisme* peradaban abad ke-20.

Nada pesimis *Dialectics of Enlightenment* kelihatan pada bagian akhir *The Structural Transformation*. Idealisasi ruang publik borjuis untuk mengkritik penyimpangannya di zaman kini, seperti yang digagasnya di bagian depan, hanya akan terdengar seperti nostalgia. Nyatanya, sejak Pencerahan menjadi mitos dan ruang publik borjuis telah menjadi arena iklan, tidak ada lagi dasar normatif dan empiris untuk membangun teori kritis. Semua jalan sepertinya berujung buntu. Habermas hanya dapat menyerukan pembaruan proses demokratisasi lembaga-lembaga dan ruang publik, namun tidak dapat menawarkan dasar institusional dan menggambarkan gerakan sosial untuk mewujudkannya. Kegamangan Habermas terlihat dari cara pandangannya terhadap *welfare state* dalam *The Structural Transformation* (Johnson, 2001: 225). Di satu pihak, pada *welfare state* ia melihat satu-satunya peluang imanen untuk menegakkan kembali ruang publik dalam masyarakat modern. Namun di lain pihak, *welfare state* juga berpotensi menggerus ruang publik karena membuka peluang bagi negara untuk memasuki wilayah yang semestinya di bawah otonomi privat itu.

Seperti sudah diketahui, Habermas terus mencari jalan baru untuk menembus kebuntuan tersebut. Ia berpaling pada bahasa untuk mencari dasar filosofis bagi suatu teori kritis baru. Pencarian ini memuncak pada karya terpenting Habermas, *The Theory of Communicative Action* (1989). Menurut Habermas, dalam fenomena bahasa dan komunikasi antar manusia terkandung norma-norma untuk mengkritik segala bentuk dominasi dan penindasan serta untuk memperjuangkan demokratisasi. Menurut Habermas, ketika dua orang atau lebih berbicara dalam suatu diskursus, mereka hendaknya saling memahami terlebih dahulu sebelum sampai pada hal-hal lain. Kehendak untuk memahami dan dipahami itu imanen pada tindakan berbicara, dan hal ini berlaku bagi siapa pun dan di mana pun. Inilah rasionalitas yang dapat dipakai sebagai dasar suatu teori kritis. Prinsip rasional ini merupakan hakikat "transendental" dari tindakan berkomunikasi. Habermas kemudian merumuskan norma-norma kritis yang disebutnya sebagai 'syarat-syarat wicara ideal' (*ideal speech situations*).

Teori kritis baru ini dipakai oleh Habermas untuk menyoroti terjadinya kolonisasi ruang hidup (*lifeworld*) oleh sistem (*system*). Secara ringkas, ruang hidup, menurut Habermas, merupakan **arena berlangsungnya peristiwa sehari-hari dan tindakan komunikatif menduduki tempat yang sentral**. Sementara itu, sistem merupakan mekanisme untuk mengatur tindakan individu-individu, memberi makna fungsional terhadap tindakan, dan memastikan bahwa sistem tetap bekerja seperti dimaksud. Sistem dalam dikotomi ini mewakili proses rasionalisasi modernitas yang berupa birokratisasi dan instrumentalisasi seperti digagas oleh Weber. Sebenarnya, ruang hidup juga mengalami rasionalisasi sendiri, namun rasionalitas instrumental dalam sistem berkembang lebih kuat dan akhirnya menjajah ruang hidup. Akibatnya, rasionalitas komunikasi seperti yang terdapat pada syarat-syarat wicara ideal di zaman modern telah dikuasai oleh rasionalitas instrumental. Habermas menyebut kondisi ini sebagai komunikasi yang mengalami distorsi.

Ukuran normatif, seperti dalam syarat-syarat wicara ideal itu, lalu dipakai untuk membangun gagasan baru mengenai ruang publik ideal. Idealisasi ruang publik borjuis mengandaikan secara keliru tiadanya, atau minimnya, perbedaan kepentingan individu. Begitu mengatasi ruang lingkup privatnya, individu-individu digambarkan berkumpul di ruang publik sebagai satu suara di hadapan intervensi politik negara. Teori kritis tindakan komunikatif memungkinkan Habermas untuk menghilangkan asumsi uniformitas kehendak tersebut. Biarpun ada perbedaan kepentingan dan latar belakang budaya, keniscayaan dalam tindakan komunikatif akan "memaksa" individu-individu di ruang publik untuk sampai pada pemahaman terhadap satu sama lain. Rasionalitas ruang publik tidak lagi bersandar pada asumsi mengenai kepentingan umum yang otomatis diwakili oleh ruang publik borjuis, melainkan pada etika diskursus universal. Konsensus tercapai bila terjadi pemahaman bersama bersifat intersubjektif mengenai sesuatu yang secara argumentatif memang lebih baik. Kondisi ideal suatu diskursus menuntut bahwa kesamaan hak setiap orang untuk terlibat dalam diskusi dijamin dan bebas dari segala bentuk dominasi, baik yang sifatnya internal menyangkut perilaku individual maupun eksternal dalam rupa komunikasi yang terdistorsi secara sistematis. Hanya bila kondisi ini terpenuhi, konsensus yang tercapai dapat disebut rasional.

Proses diskursif dalam pembentukan opini dan kehendak di ruang publik itu akan makin terjamin bila diletakkan di atas bangunan struktur politik dan hukum. *Between Facts and Norms* (1996) memperlihatkan bagaimana Habermas menyusun argumentasi untuk suatu ruang publik berhadapan dengan struktur politik dan hukum. Ruang publik merupakan sarana peringatan dini dengan sensor yang sensitif menangkap persoalan-persoalan dalam masyarakat. Selanjutnya, ruang publik tidak hanya mendeteksi persoalan, tetapi juga harus memperkuat tingkat kepentingan dari persoalan-persoalan itu dengan cara merumuskannya, menyodorkan beberapa kemungkinan solusi, bahkan mendramatisasi persoalan supaya ditangkap oleh otoritas politik. Ruang publik memang bukan suatu institusi apalagi institusi resmi dalam struktur politik. Memakai kata-kata Habermas: "Ruang publik paling tepat digambarkan sebagai suatu jaringan untuk mengkomunikasikan informasi dan berbagai cara pandang ...; arus-arus informasi, dalam prosesnya, disaring dan dipadatkan sedemikian sehingga menggumpal menjadi simpul-simpul opini publik yang spesifik menurut topiknya" (Habermas, 1996: 360). Harapannya, opini publik akan mempengaruhi proses pengambilan putusan dalam struktur politik dan hukum yang mapan. Kapasitas ruang publik untuk memberi solusi sendiri memang terbatas, namun kapasitas tersebut dapat digunakan untuk mengawasi bagaimana sistem politik menangani persoalan-persoalan yang muncul di tengah masyarakat (Habermas 1996: 359).

Persoalan kemudian adalah apakah ruang publik yang dicita-citakan Habermas tersebut memberi kesempatan seluas-luasnya bagi perbedaan yang menjadi ciri suatu masyarakat multikultural sekaligus masih sanggup menghasilkan suatu konsensus?

### C. KONVERGENSI PERSOALAN

Persoalan mendasar dalam multikulturalisme terletak pada sejauh mana 'multi' itu didefinisikan. Multikulturalisme berarti sikap normatif tertentu untuk mengakui fakta keragaman dalam masyarakat. Definisi tersebut merupakan definisi minimal karena sesudah pengakuan keragaman, setiap rezim multikulturalisme dapat menempuh jalan yang berbeda-beda bagaimana memperlakukan keragaman itu dalam struktur politik dan hukum yang baku.

Secara garis besar, ada tiga jenis rezim multikulturalisme. Rezim pertama menganut strategi asimilasi. Menurut rezim ini, macam-macam kelompok budaya dalam masyarakat hendaknya menyesuaikan diri, bahkan mengadopsi budaya kelompok mayoritas dalam masyarakat. Tujuan akhirnya adalah menciptakan masyarakat yang, kendati berasal dari latar belakang budaya yang berbeda-beda, berkembang menjadi satu entitas. Dengan bahasa yang lebih lugas, rezim ini bercita-cita mengubah heterogenitas menjadi homogenitas; perbedaan hanyalah fenomena superfisial. Atau dengan kata lain, tujuan akhir rezim ini justru menghapus multikulturalisme itu sendiri.

Rezim kedua, adalah kebalikannya, yaitu rezim komunitarian. Komunitarianisme percaya bahwa setiap individu atau kelompok bangsa mempunyai adat kebiasaan, cita-cita, dan nilai-nilai hidup yang berbeda-beda dan tak mungkin disatukan. Oleh karena itu, masyarakat yang terdiri dari beragam bangsa hendaknya diberi kelonggaran seluas mungkin untuk mempraktikkan dan mewujudkan cita-cita hidupnya. Fungsi negara terbatas pada menjamin kebebasan bagi masing-masing kelompok atau individu. Rezim komunitarian menciptakan masyarakat di dalam masyarakat yang bentuk akhirnya bisa berupa *ghetto-ghetto* yang disatukan hanya oleh kekuasaan negara.

Dasar filosofis kedua rezim itu memang saling bertolak belakang. Rezim asimilasi percaya pada universalisme hakikat manusia, sementara rezim komunitarian percaya pada kemutlakan perbedaan. Meskipun demikian, dua-duanya sebenarnya bertumpu pada monisme filosofis, yaitu pemutlakan ketunggalan penafsiran mengenai hakikat manusia. Padahal heterogenitas masyarakat sering kali menyangkut perbedaan mengenai apa yang dipandang sebagai 'hidup baik'. Etika yang berlaku internal untuk setiap kelompok belum tentu saling sesuai ketika bertemu di ruang publik. Rezim asimilasi mudah jatuh pada superioritas budaya mayoritas. Rezim komunitarian, bila didorong sampai pada kemungkinan maksimal, ber-akhir pada *apartheid* yang senilai dengan tiadanya hidup bersama.

Rezim ketiga meniti jembatan di antara dua tepian tersebut, yaitu mencari keseimbangan antara menghargai keunikan individu dan tuntutan untuk menciptakan kebersamaan yang substantif, tidak sekadar prosedural. Multikulturalisme sebenarnya paling tepat menunjuk pada rezim ketiga ini. Keberhasilan rezim ini ditentukan oleh tanggapannya terhadap tuntutan ganda: perbedaan sekaligus kesatuan. Perbedaan adalah mengenai kepentingan yang tidak selalu sama antara satu kelompok dengan kelompok lain, sementara kesatuan menyangkut solidaritas dan kesamaan komitmen pada satu bentuk kehidupan bersama yang bersifat lintas kelompok. Pencarian keseimbangan itu dipandu oleh *philosophical primacy* yang dianut suatu rezim multikultural. Yang condong mendahulukan perbedaan akan mencari cara supaya komitmen lintas kelompok apa pun tidak mengurangi kemungkinan maksimalisasi perwujudan nilai-nilai hidup partikular. Yang mengutamakan kesatuan komitmen akan menetapkan batas-batas yang tidak boleh

dilanggar oleh klaim-klaim yang bersifat partikular. Pada hemat saya, menghargai perbedaan sangat menentukan bentuk multikulturalisme yang dipilih, akan tetapi bagaimana membangun kesatuan itulah yang secara praktis mempertahankan multikulturalisme dalam bentuk apa pun. Dengan kata lain, persoalan multikulturalisme terletak pada mencari dasar yang bisa menjadi alas berdirinya kepentingan umum. Di sinilah terjadi konvergensi persoalan antara multikulturalisme dan ruang publik.

Ruang publik dalam pemikiran Habermas bertujuan membentuk opini dan kehendak (*opinion and will formation*) yang mengandung kemungkinan generalisasi, yaitu mewakili kepentingan umum. Dalam tradisi teori politik, kepentingan umum selalu bersifat sementara dan mudah dicurigai sebagai bungkus kehendak sekelompok elite untuk berkuasa. Generalisasi yang dimaksud Habermas sama sekali bukan dalam arti statistik, melainkan filosofis karena bersandar pada etika diskursus. Masalahnya, masih mungkinkah di zaman mutakhir sekarang ini klaim kepentingan umum bisa dipertanggung jawabkan? Masyarakat modern begitu masif dan kompleks sehingga sulit memikirkan ide mengenai 'masyarakat' sebagai satu keseluruhan. Masyarakat modern mungkin sudah lama mengingkari kemungkinan adanya pengalaman organik mengenai kepentingan umum. Apalagi kritik metanaratif seperti disuarakan para postmodernis membuat status ontologis dari kepentingan umum makin meragukan. Dalam terminologi tulisan ini, publik yang dimaksud dalam ruang publik tidak lagi tunggal. Setiap kali berbicara mengenai publik, yang dimaksud adalah pluralitas publik. Ada baiknya di sini sebentar kita melihat isi gagasan mengenai 'publik'.

John Dewey mendefinisikan publik sebagai berikut: "...terdiri dari semua orang yang terkena konsekuensi-konsekuensi tidak langsung dari transaksi sedemikian sehingga merasa perlu mengatur konsekuensi-konsekuensi tersebut" (dalam Johnson, 2001: 216). Dalam definisi ini terlihat bahwa ide 'publik' tidak menunjuk langsung pada kepentingan umum apapun. Yang ditunjuk adalah suatu proses membangun solidaritas melalui interpretasi terhadap konsekuensi-konsekuensi tidak langsung itu. Proses interpretasi tersebut diharapkan dapat mencapai konsensus mengenai pentingnya konsekuensi-konsekuensi tersebut, dan mampu membangkitkan kesadaran mengenai kebutuhan untuk menanggapi secara programatik. Gagasan Dewey ditolak oleh Carl Schmitt yang menganggap bahwa demokrasi liberal yang memuja pluralitas kepentingan dan cara pandang tidak akan sampai pada konsensus mengenai hal-hal seperti digambarkan Dewey. Sebagai seorang pendukung Nazi Jerman, Schmitt lalu mempropagandakan bahwa demokrasi modern hanya dapat berkembang ditangan pemerintahan otoriter yang kuat; yang membela satu ide homogen mengenai cara hidup yang baik.

Kaitan antara kesatuan masyarakat dan kepentingan umum ditolak oleh para postmodernis. Demokrasi, menurut pendapat ini, tidak membutuhkan pemahaman konsensual apapun mengenai kepentingan umum. Iris Young (Johnson, 2001: 217) menyatakan: "Perbedaan tidak dapat direduksi, melainkan dihargai dan malah dapat membentuk totalitas yang tidak terpusat (*polity as a decentred totality*)". Ini berarti, setiap kali berbicara mengenai ruang publik, yang dimaksud adalah banyaknya ruang publik. Bila demikian halnya, diskusi mengenai ruang publik tidak beranjak maju, sebab kita masih harus mencari lagi istilah baru untuk menggambarkan relasi komunikatif di antara banyak ruang publik.

#### **D. RASIONALITAS PROSEDURAL**

Berbeda dari komunitas yang ditandai oleh relasi interpersonal yang informal dan intensif, atau berbeda dari kelompok-kelompok kategorial yang disatukan oleh anggapan mengenai kesamaan budaya, publik tidak memiliki kadar keakraban seperti kedua bentuk

kumpulan individu tersebut. Dalam bahasa Craig Calhoun (1999:220), publik adalah: "Kelompok-kelompok semu yang terbentuk karena keterlibatannya dalam diskursus yang bertujuan menentukan hakikat institusi-institusi sosial termasuk negara". Pada wilayah ini, individu-individu berbicara satu sama lain sebagai, kurang lebih, orang asing. Hal ini bukan berarti bahwa mereka belum pernah saling bertemu, melainkan mereka tidak terikat oleh jalinan pemahaman bersama yang kental atau oleh relasi-relasi sosial bersama. Jalinan pemahaman dan relasi sosial itu harus mereka bentuk dan tidak ada dengan sendirinya seperti pada komunitas maupun kelompok kategorial.

Habermas memang tidak mengandaikan kadar keakraban yang kental ketika membayangkan ruang publik. Sebaliknya, ruang publik baginya tidak perlu mengandaikan homogenitas apa pun. Seperti dikutip oleh John Sitton (2003: 147-148), menurut Habermas: "Latar belakang konsensus yang dibangun atas dasar homogenitas kultural dan dianggap sebagai syarat katalisis yang mutlak bagi demokrasi menjadi berlebihan sejauh publik, yaitu proses-proses pembentukan opini dan kehendak yang terstruktur secara diskursif, memungkinkan suatu pemahaman politis yang masuk akal bahkan bagi orang-orang yang tidak saling kenal." Homogenitas dalam rupa identitas kolektif bukanlah sesuatu yang diberikan begitu saja oleh sejarah. Kemudian Habermas (Sitton, 2003: 148) menyatakan: "Identitas itu bisa muncul dari isi cair suatu proses sirkular yang berlangsung melalui pelembagaan komunikasi para warga negara". Ini berarti identitas kolektif itu dibentuk, dan bukan ditemukan. Supaya proses ini berlangsung, ia harus disokong oleh ruang hidup yang rasional (*rasionalized lifeworld*). Ruang hidup rasional membangkitkan suatu budaya politik liberal yang dapat menghasilkan identitas-identitas kolektif demokratis baru.

Wilayah ruang hidup merupakan arena terjadinya internalisasi etika kelompok sehingga sebenarnya potensial mengganggu terbentuknya suatu kolektivitas lintas kelompok. Kalau demikian, bagaimana mungkin mengharapkan terjadi rasionalisasi ruang hidup seperti yang dipikirkan Habermas tadi? Terhadap pertanyaan ini, Habermas mengandaikan netralitas hukum prosedural. Menurut Habermas (1994: 135): "Netralitas hokum *vis-a-vis* keragaman etis internal muncul dari fakta bahwa dalam masyarakat yang kompleks, kewargaan secara keseluruhan tidak dapat disatukan oleh suatu konsensus substantif mengenai nilai-nilai, melainkan hanya oleh suatu konsensus mengenai prosedur untuk pemberlakuan hukum yang legitim dan praktik kekuasaan yang legitim". Jadi, Habermas masih mengandaikan suatu konsensus, tetapi konsensus mengenai prosedur hukum dan politik. Habermas yakin warga negara masyarakat multikultural berbagi keyakinan rasional bahwa kebebasan komunikasi dalam ruang publik, proses demokratis bagi penyelesaian konflik, dan penyaluran kekuasaan politik secara konstitusional, bersama-sama menyediakan suatu dasar untuk mengawasi dan memastikan supaya kekuasaan digunakan demi kepentingan bersama yang setara. Bila rasionalitas itu berfungsi niscaya konsensus akan tercapai, dan integrasi politis kelompok-kelompok yang berbeda akan terjamin.

Keyakinan Habermas mengenai prosedur hukum dan politik tersebut agaknya mengendur ketika berhadapan dengan problematika multikulturalisme. Ketika berbicara mengenai identitas kolektif yang terbentuk di ruang publik, Habermas berulang kali menyebutkan istilah 'patriotisme konstitusional' (*constitucional patriotism*). Hal tersebut merupakan semacam budaya politik bersama yang mestinya menjadi objek loyalitas warga negara. Budaya politik ini "berakar pada suatu interpretasi terhadap prinsip-prinsip konstitusional dari perspektif pengalaman historis bangsa yang bersangkutan" (Habermas, 1994: 134). Interpretasi itu tidak dapat netral di hadapan pengalaman historis. Patriotisme konstitusional yang berakar pada sejarah bangsa, dikatakan Habermas,

hendaknya terkait dengan motivasi dan keyakinan warga negara. Tanpa jangkar motivasional ini, patriotisme tidak akan menjadi kekuatan pendorong yang sanggup menuntun proyek menuju masyarakat yang bebas dan setara.

Budaya politik mudah dicurigai sebagai bentuk lain superioritas *host culture* dalam wacana multikulturalisme. Akan tetapi, Habermas segera menambahkan bahwa patriotisme konstitusional harus diletakkan dalam tingkat yang berbeda dari prosedur hukum dan politik. Substansi etis dari patriotisme konstitusional bekerja pada tingkat subpolitik dan hendaknya tidak menyimpang dari netralitas sistem hukum yang berada pada tingkat politik. Dengan kata lain, integrasi etis hendaknya tidak dicampuradukkan dengan integrasi politik yang lebih abstrak sifatnya, yaitu integrasi prosedural tadi. Keduanya saling berkaitan, namun harus dibedakan. Patriotisme hendaknya justru senantiasa mempertajam kepekaan mengenai keragaman dan kesatuan berbagai cara hidup dalam masyarakat multikultural. Sesudah itu, netralitas hukum prosedural akan menjamin integrasi pada tingkat politik.

Gagasan mengenai dua tingkat integrasi itu memperlihatkan perbedaan yang dilakukan Habermas mengenai ruang privat dan ruang publik. Bagi Habermas, ruang privat menjamin kebebasan setiap orang menjalani pilih cara hidupnya, sekaligus memberi tempat bagi kepekaan terhadap perbedaan. Ruang publik memastikan bahwa kesatuan terjamin, merumuskan prinsip-prinsip yang menentukan sejauh mana perbedaan dan keragaman itu diizinkan dan memberi keyakinan kepada masyarakat untuk mentoleransi, bahkan menyambut (baca: menghargai) adanya perbedaan di ruang privat.

#### **E. SOLIDARITAS TANPA INTIMITAS**

Bangunan gagasan Habermas mengenai ruang publik bersandar pada teori tindakan komunikatif yang berciri amat prosedural. Ciri prosedural merupakan jawaban Habermas terhadap tuntutan universalisme suatu teori kritis di tengah-tengah krisis kepercayaan terhadap dasar empiris dan teoretis apapun (Poespowardjojo, 2007). Habermas juga sempat melirik argumentasi substantif seperti patriotisme konstitusional, namun itu tetap diletakkan dalam kerangka rasionalitas: prosedural yang imanen pada tindakan komunikatif. Oleh karena itu, kelemahan teori tindakan komunikatif melemahkan pula gagasan Habermas mengenai ruang publik.

Tindakan komunikatif yang bebas dari segala bentuk dominasi terjadi ketika dilakukan antara pihak-pihak yang setara. Pertanyaan besar yang langsung menggantung adalah, tidakkah ini suatu utopia yang bahkan sebagai *ideal type* pun sulit dibayangkan di muka bumi yang penuh ketimpangan ini? Setiap masyarakat bergelut dengan persoalan ketimpangan kekuasaan ekonomi, politik, dan budaya. Bahkan, andaikata terjadi kesetaraan ekonomi dan politik, kesetaraan pengakuan budaya belum tentu terjamin. Hal ini paling terasa dalam masyarakat multikultural. Para imigran atau kelompok etnis minoritas tidak punya cukup kekuasaan politik dan ekonomi supaya kehadiran mereka diperhitungkan. Atau sebaliknya, kelompok minoritas amat berkuasa dan meminggirkan kelompok yang dalam jumlah termasuk mayoritas. Memandang kesetaraan yang tak kunjung tercapai, Habermas bisa dengan mudah berkomentar bahwa komunikasi saat ini sedang mengalami distorsi dan teori tindakan komunikatif persis berusaha menetapkan ukuran-ukuran tindakan komunikatif yang bebas distorsi. Kalau begitu, teori kritis lama kelamaan terdengar seperti janji manis yang tak akan pernah terpenuhi. Agar kelompok-kelompok dalam masyarakat dapat berkomunikasi sebagai pihak yang setara di ruang publik, dibutuhkan lebih daripada sekedar pengadaan mengenai rasionalitas tindakan

komunikatif. Teori deliberasi politik manapun akan tetap tinggal sebagai utopia tanpa merumuskan secara hati-hati struktur ruang publik tersebut.

Ruang publik yang mengandaikan rasionalitas prosedural sistem politik dan hukum mungkin menarik bagi para akademisi yang terbiasa berpikir ketat dan 'bebas nilai'. Masalahnya, deliberasi politik bukanlah diskusi akademik. Argumentasi yang menjadi tulang punggung suatu deliberasi tidak punya bobot pada dirinya sendiri. Kita inilah yang memberikan bobot itu atas dasar nilai-nilai, intuisi, akal, penilaian, pengalaman, dan ingatan historis kita. Karena itu, ukuran 'demi argumentasi yang lebih baik' terdengar naif, lepas dari berbagai bentuk pembobotan itu. Masyarakat multikultural disebut demikian persis karena beragamnya nilai-nilai, intuisi, dan pengalaman historis. Setiap argumentasi diartikulasikan lewat suatu bahasa tertentu yang tidak dapat begitu saja diumumkan atau dibersihkan dari asosiasi budaya yang melekat pada dirinya.

Prosedur rasional diharapkan Habermas membebaskan argumentasi dari bobot partisan yang boleh jadi tidak rasional. Kalaupun ini berhasil, solidaritas macam apakah yang dihasilkan? Nampaknya, solidaritas sosial yang dibayangkan Habermas juga hanya solidaritas yang prosedural bebas muatan intimitas yang biasanya tercipta berkat loyalitas pada seperangkat nilai maupun ingatan historis. Telos atau tujuan akhir dari multikulturisme terletak pada pencapaian 'hidup baik' seperti yang terdapat pada substansi etis setiap kebudayaan. Isi 'hidup baik' tersebut ikut menentukan penerimaan terhadap rumusan kepentingan umum yang dibicarakan di ruang publik. Substansi etis inilah yang sering kali membangkitkan kehendak individu untuk mengejar satu tujuan, termasuk kepentingan umum. Bila substansi etis itu dibuat abstrak lewat suatu prosedur deliberasi, masih adakah ikatan motivasional untuk mengusahakan multikulturisme? Dengan kata lain, mungkinkah solidaritas tanpa intimitas?

Memang tidak mudah merumuskan jawaban bagi pertanyaan tentang bagaimana menjalankan deliberasi politik sementara semua deliberasi terikat pada ingatan masa lalu dan kekuatiran akan masa depan. Bhikhu Parekh memberi catatan kecil pada segala bentuk teori deliberasi politik seperti yang digagas Popper, Habermas, dan Rawls. Menurut Parekh (2000: 311): "...kita hendaknya tidak usah berpandangan terlalu rasionalistik mengenai rasionalitas politik karena bila demikian, kita akan berharap terlalu banyak pada deliberasi politik sekaligus beresiko kehilangan kepercayaan padanya bila ia gagal memenuhi harapan kita". Debat politik tidak pernah murni rasional. Kita hendaknya tidak usah berlebihan dalam mencoba meruntuhkan argumentasi lawan diskusi kita dan menyakinkan mereka akan validitas argumentasi kita.

Dialog tidak akan berhasil, kecuali setiap pihak siap untuk memeriksa secara kritis ketakutan, penilaian, dan asumsi-asumsi yang dibawanya saat debat, dan kemudian mengubah bahkan meninggalkannya. Kendati ada kekurangan, pencarian Habermas terhadap ruang publik pantas dibela dihadapan situasi konflik di mana masing-masing pihak berkeras membela diri demi kepentingannya sendiri. Fakta bahwa kita semua berbagi dunia yang sama dan setiap orang terus-menerus berhadapan dengan pengalaman perdebatan berarti bahwa kita hanya dua pilihan: mengusahakan ruang publik atau menanggung akibatnya.

## F. PENUTUP

Apapun pilihan yang akan kita hadapi untuk menerapkan konsep 'ruang publik' yang ditawarkan Habermas, keragaman budaya masyarakat yang kita miliki adalah suatu kenyataan yang tak bisa kita hindari. Hal tersebut perlu kita sadari dan tanamkan dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara. Apalagi saat sekarang demokrasi telah menjadi anak emas dalam sistem dan praktek penyelenggaraan negara kita. Dalam sistem

dan praktek penyelenggaraan negara yang demokratis, apapun keputusan publik, apapun program atau kebijakan yang dibuat untuk masyarakat, tentu saja akan dihadapkan pada pengalaman perdebatan, diskusi, kompromi dan konsensus diantara beragam individu dengan keragaman budaya yang dimiliki. Karena, menurut Habermas, pada ruang publik inilah segala keputusan yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan bersama diputuskan.

Tetapi tawaran itu tidak saja dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam kehidupan bermasyarakat pun, perlu diupayakan agar selalu ada ruang publik bagi masyarakat. Karena kehidupan bersama masyarakat multikultural niscaya sangat ditentukan oleh apa yang terjadi dalam ruang publik tersebut.

## REFERENSI

- Bhikhu Parekh 2000. *Rethinking Multiculturalism Cultural Diversity and Political Theory*. Cambridge: Harvard University Press.
- Craig Calhoun. 1999. "Nationalism, Political Community and the Representation of Society" dalam *European Journal of Social Theory* Vol.2, hlm. 217-231.
- David Held. 1997. *Introduction to Critical Theory Horkheimer to Habermas*. Cambridge: Polity Press.
- Douglas Kellner. "Habermas, the Public Sphere, and Democracy: A Critical Intervention" (artikel online) <http://www.gseis.ucla.edu/facultykellner/papers/haharmas.htm>.
- Jurgen Habermas. 1996. *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Cambridge: MIT Press., 1987, dalam *Jurnal The Theory of Communicative Action* Vol.2, Boston: Beacon Press.
- "Struggles for Recognition in the Democratic Constitutional State" dalam Amy Gutmann (ed.).1994. *Multiculturalism: Examining the Politics of Recognitions*. Princeton: Princeton University Press.
- Pauline Johnson. 2001. "Habermas's Search for the Public Sphere" dalam *European Journal of Social Theory* Vol. 4, hlm. 215-236.
- John F. Sitton. 2003. *Habermas and Contemporary Society*. New York: Palgrave Macmillan.
- Poespowardjojo S. 2007. *Bahan Kuliah Filsafat Ilmu Pengetahuan*. S3 Administrasi Publik. Universitas Indonesia.